PERAN KEPALA SEKOLAH DALAM MENGINPLEMENTASIKAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (MBS) DI SDN 1 BALEGONDO MAGETAN

PERAN KEPALA SEKOLAH DALAM MENGINPLEMENTASIKAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (MBS) DI SDN 1 BALEGONDO MAGETAN

Alfy Rezta Yulina

10040254215 (PPKn,FISH,UNESA) dan alfyreza04@gmail.com

Dr.Totok Suyanto, M.Pd

(PPKn,FISH,UNESA) dan TotokSuyanto@unesa.ac.id

Abstrak

Implementasi MBS dipicu kemauan untuk meningkatkan pendidikan secara berkesinambungan. MBS juga di dorong oleh persaingan yang cukup ketat di Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan tersebut. Teori menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi bermain sesuai apa yang diterapkan pada budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun individu berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran kepala sekolah dalam implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di SDN 1 Balegondo Magetan. Adapun informan penelitian yakni kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan wali kelas 6. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara terstruktur. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di SDN 1 Balegondo, Magetan peran kepala sekolah dalam implementasi Manajemen Berbasis Sekolah yakni meliputi peran sebagai educator, manajer, administrator, supervisor, leader, innovator dan motivator dapat disimpulkan bahwa implementasi MBS yang dilaksanakan di sekolah sudah berjalan dengan baik. Adanya otonomi pengelolaan merupakan potensi bagi sekolah meningkatkan kinerja dan partisipasi langsung masyarakat. Peran kepala sekolah dalam membina hubungan yang harmonis dengan guru, karyawan/staf serta orang tua siswa membantu meningkatkan implementasi Manajemen Berbasis Sekolah yang sudah sesuai dengan prinsip MBS dan mencakup tujuh komponen yang ada didalamnya.

Kata kunci : peran kepala sekolah, implementasi manajemen berbasis sekolah”

Abstract

The implementation of SBM demands a considerable creative, innovative and professional attitude of the principal. This MBS implementation is triggered by a willingness to improve education on an ongoing basis. MBS is also driven by a fairly tight competition in Ngariboyo District, Magetan District. Role theory describes social interaction in the terminology of actors who play according to what is applied to culture. In accordance with this theory, together that lead us to behave in everyday life. When defined by the role is the behavior one expects in a certain status, then the role behavior is the actual behavior of the person performing the role. Role behavior may differ from expected behavior for several reasons. The role theory gives the first two hopes, the expectations of the community from the role holder to the other person who has a relationship with him in carrying out his role. Role theory provides two hopes and interconnected to get reward. The purpose of this study is to determine the role of head of school implementation of School Based Management in SDN 1 Balegondo Magetan. Data collection techniques used were interviews. Interviews used were open structured interviews to gain information on the role of teachers as organizers in the implementation of SBM. Based on the results of research that has been done in SDN 1 Balegondo, Magetan The role of school principals in the implementation of School Based Management that includes the role as educator, manager, administrator, supervisor, leader, innovator and motivator can be concluded that the implementation of SBM implemented at SDN 1 Balegondo already running well. The role of school principals in fostering harmonious relationships with teachers, employees / staff and parents helps to improve the implementation of School Based Management that is in accordance with the principles of SBM and includes seven components in it.”

Keywords: headmaster, implementation of school based management

PENDAHULUAN

Pendidikan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan bangsa dan merupakan wahana dalam menerjemahkan pesan-pesan konstitusi serta sarana untuk membangun watak-watak bangsa. Masyarakat yang cerdas akan memberikan suasana yang cerdas pula dan

secara progresif akan membentuk kemandirian. Output dimasa mendatang diharapkan bukan hanya dapat memandang manusia sebagai pekerja tetapi sebagai mitra kerja dengan keunggulan yang berbeda. Kualitas Sumber Daya Manusia dapat ditingkatkan melalui berbagai program pendidikan yang dilaksanakan secara sistematis

dan terarah berdasarkan kepentingan yang mengacu pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) serta dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan (Imtak).

Menurut Undang Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah bahwa dalam pembagian urusan pemerintah bidang pendidikan dijelaskan bahwa “ Daerah atau kabupaten maupun kota dapat mengelola pendidikan dasar, pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal”. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengurus kepentingan bidang pendidikan untuk mengetahui lebih dekat cara dalam memperbaiki pendidikan sesuai dengan kebutuhan masing masing daerah guna meningkatkan kualitas pendidikan khususnya sumber daya manusia.”

Hingga saat ini masalah pendidikan di Indonesia menjadi perhatian khusus oleh pemerintah. Karena indeks pembangunan pendidikan di Indonesia menurun. Salah satu penyebab rendahnya pendidikan pembangunan di Indonesia adalah semakin banyak jumlah anak putus sekolah. Andini (2007:47) dalam bukunya yang berjudul “ Isu isu pendidikan” menyatakan bahwa fakta yang ditemukan saat ini, ketika kebijakan otonomi diterapkan terjadi dua kendala yakni 1) ketidaksiapan masyarakat dalam menata diri sendiri,2) ditemukannya fenomena bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota sepertinya tidak memahami hakekat memimpin pada alam demokrasi dan otonomi.

Era desentralisasi pendidikan telah membawa perubahan-perubahan mendasar dalam berbagai kehidupan termasuk pendidikan. Salah satu perubahan mendasar yang berjalan saat ini adalah manajemen berbasis daerah yang sering dikenal dengan istilah otonomi daerah yang disahkan dalam "Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian diikuti dengan petunjuk teknis pedoman pelaksanaan berupa "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi. Konsekuensi dari penerapan undang-undang ini menyebabkan daerah harus berpacu untuk bisa mengembangkan potensi daerahnya masing-masing termasuk Pengembangan di bidang pendidikan. Pengembangan pendidikan diserahkan kepada kebijakan masing masing sekolah yang dikenal dengan Manajemen Berbasis sekolah.

Arif dan teguh (2010 : 33) dalam “ Education policy” mengatakan bahwa Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pasca orde baru (orde reformasi), adalah kebijakan di bidang pendidikan yang menentukan kiprah bangsa di masa depan. Kebijakan yang dimaksud adalah

kebijakan untuk peningkatan sumber daya manusia yang unggul melalui sistem pendidikan. Kebijakan pendidikan memberikan peran semua komponen bangsa menjadi lebih demokratis. Tidak hanya pemerintah yang memikirkan konsep pendidikan tetapi menjadi tanggung jawab bersama.

Demokrasi inilah yang memberikan ruang terbuka dan perbedaan berbagai prinsip serta nilai dari masyarakat. Konsekuensi dari penerapan demokrasi pendidikan adalah memberikan kebebasan bertindak sesuai dengan kehendak namun tetap dalam batasan normatif tertentu. Demokrasi pendidikan mempunyai konsekuensi bagi terbentuknya desentralisasi kewenangan dalam pengelolaan pendidikan. Pengelolaan akan dilaksanakan oleh pelaksana langsung, baik birokrat maupun tenaga pendidik serta masyarakat yang bertujuan mengembangkan strategi belajar mengajar untuk membentuk kualitas peserta didik menjadi sosok warga Negara yang unggul.

Eksistensi MBS di sekolah menjadikan peran kepala sekolah sangat penting dalam mengembangkan dan memajukan lembaga pendidikan, tenaga kependidikan dan outputnya. Mulyasa (2006 : 82) Dinas Pendidikan telah menetapkan bahwa kepala sekolah harus mampu memainkan perannya sebagai educator, manager, administrator dan supervisor. Jadi implementasi MBS menuntut sikap kreatif, inovatif dan profesionalisme kepala sekolah yang cukup besar. Implementasi MBS ini dipicu oleh kemauan untuk meningkatkan pendidikan secara berkesinambungan. MBS juga di dorong oleh persaingan yang cukup ketat di Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan tersebut.

Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, peranan guru sebagai tenaga pendidik merupakan kunci keberhasilan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah, karena guru adalah ujung tombak dalam lingkungan sekolah yang langsung berhubungan dengan peserta didik . Bagaimanapun bagusnya manajemen suatu sekolah , sarana dan prasarana yang lengkap tanpa didukung guru yang profesional akan menjadi sia-sia dan jauh dari tujuan pendidikan itu sendiri.

Menurut pengakuan kepala sekolah SDN Balegondo I Magetan, implementasi manajemen berbasis sekolah sudah berjalan sejak tahun 2005. Namun berdasarkan hasil pra-riset belum banyak warga sekitar yang mengetahui tentang kebijakan kepala sekolah dalam menerapkan MBS, bahkan sebagian dari warga belum mengetahui apa yang dimaksud MBS. Dalam 2 tahun terakhir ini, SDN Balegondo 1 Magetan telah melakukan renovasi beberapa ruangan yang harus memenuhi

PERAN KEPALA SEKOLAH DALAM MENGINPLEMENTASIKAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (MBS) DI SDN 1 BALEGONDO MAGETAN

standart dari pemerintah yakni perpustakaan dan ruang kelas khususnya. Mewajibkan bagi setiap guru kelas mempunyai literatur buku pengajaran minimal 5 buku, serta memberikan peran aktif kepada Komite sekolah dalam upaya mengembangkan serta mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah di SDN 1 Balegondo. Hasil observasi peneliti beberapa sekolah yang menerapkan MBS salah satunya di SDN 1 Balegondo, SDN balegondo merupakan SDN yang menerapkan MBS sejak beberapa tahun terakhir, dalam hal mutu SDN tersebut sudah dapat dikatakan baik karena SDN 1 Balegondo ini merupakan salah satu sekolah favorit di Kecamatan Ngariboyo. Terbukti dengan adanya hasil Ujian Nasional yang menduduki peringkat terbaik se-Kecamatan Ngariboyo membuat SDN 1 Balegondo sebagai pilihan sekolah bagi calon siswa baru di daerah Balegondo tersebut. Beberapa komponen disekolah seperti kepala sekolah, guru mata kelas selalu mengembangkan kualitas sekolah serta peserta didiknya. Hal tersebut dilakukan sejak awal dengan telah dicanangkannya visi, misi dan strategi sekolah tersebut. Dengan implementasi visi, misi dan strategi sekolah tersebut menjadi salah satu sekolah favorit di Desa Balegondo yang setiap tahun dapat mencetak siswa siswa yang berprestasi.

Secara konseptual ada beberapa istilah yang berkaitan dengan manajemen berbasis sekolah (MBS), diantaranya School Based Manajemen. Konsep dasar MBS adalah mengalihkan pengambilan keputusan dari pusat ke level sekolah. Mulyasa (2002:11) mengutip pendapat BPPN dan Bank Dunia (1999) memberikan pengertian MBS atau SBM merupakan alternatif sekolah dalam program desentralisasi dibidang pendidikan, yang ditandai oleh otonomi luas ditingkat sekolah, partisipasi masyarakat dan dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. MBS memberikan kebebasan dan kekuasaan yang besar pada sekolah, disertai dengan seperangkat tanggung jawab. Dengan adanya pengalihan kewenangan pengambilan keputusan ke level sekolah, maka sekolah diharapkan lebih mampu dan mandiri dalam menentukan arah pembangunan pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan tuntutan lingkungan masyarakat.

Manajemen Berbasis Sekolah adalah alat untuk memajukan suatu sekolah dengan memajemen seluruh kebutuhan sekolah yang saling bekerjasama dalam lingkungan sekolah seperti guru, peserta didik, orang tua untuk meningkatkan kegiatan sekolah yang lebih baik. MBS merupakan model aplikasi manajemen institusional yang mengintegrasikan seluruh sumber internal dan eksternal dengan lebih menekankan pada pentingnya menetapkan kebijakan melalui perluasan otonomi sekolah. Sasarannya adalah mengarahkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan dalam

rangka mencapai tujuan. Spesifikasinya berkenaan dengan visi, misi, dan tujuan yang dikemas dalam pengembangan kebijakan dan perencanaan Manajemen berbasis sekolah memiliki banyak makna, telah di implementasikan dengan cara yang berbeda dan untuk tujuan berbeda serta pada laju yang berbeda, ditempat yang berbeda pula. Dalam Mulyasa (2002 : 16) konsep yang lebih mendasar dari “sekolah” dan “manajemen” adalah berbeda, seperti berbedanya budaya dan nilai yang melandasi upaya pembuat kebijakan. Akan tetapi alasan yang sama diseluruh tempat dimana Manajemen Berbasis Sekolah diimplementasikan adalah bahwa adanya peningkatan otoritas dan tanggung jawab ditingkat sekolah, tetapi masih dalam kerangka kerja yang ditetapkan dipusat untuk memastikan bahwa satu makna sistem terpelihara

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) bertujuan untuk meningkatkan keunggulan sekolah melalui pengambilan keputusan bersama. Fokus kajiannya adalah bagaimana memberikan pelayanan belajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa, memenuhi kriteria yang sesuai dengan harapan orang tua siswa serta harapan sekolah dalam membangun keunggulan kompetitif dengan sekolah sejenis.

Kejelasan tujuan merupakan prasyarat efektifnya sekolah. Kriteria mutu yang digambarkan dengan sejumlah kriteria pencapaian tujuan dengan indikator yang jelas menjadi bagian penting yang perlu sekolah rumuskan. Keuntungan dengan memperjelas indikator dan kriteria mutu pada pencapaian tujuan akan memandu sekolah memformulasikan strategi, mengimplementasikan strategi dan mengukur pencapaian kinerja.

Tujuan MBS adalah meningkatkan mutu keputusan untuk mencapai tujuan. Oleh karena, dalam pelaksanaan MBS memerlukan tujuan yang hendak dicapai secara jelas, jelas indikatornya, jelas kriteria pencapaiannya agar keputusan lebih terarah. Lebih dari itu dengan proses pengambilan keputusan bersama harus sesuai dengan kepentingan siswa belajar. Dilihat dari sisi standardisasi, maka penerapan MBS berarti meningkatkan standar kinerja belajar siswa melalui pengambilan keputusan bersama, meningkatkan partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan, dan meningkatkan kontrol dan evaluasi agar lebih akuntabel. Menyepakati profil hasil belajar yang diharapkan bersama merupakan dasar penting dalam melaksanakan MBS. Partisipasi seluruh pemangku kepentingan berarti meningkatkan daya dukung bersama untuk meningkatkan mutu lulusan melalui peningkatan mutu pelayanan belajar dengan standar yang sesuai dengan harapan orang tua siswa yang ditetapkan menjadi target sekolah.

Berdasarkan kajian pelaksanaan kajian di negara-negara lain maupun yang tersurat dan tersirat dalam kebijakan pemerintah dan sisdiknas no. 20 Tahun 2003, serta aspirasi masyarakat yang berkembang, setidaknya ada empat aspek yang tercakup sebagai tujuan dari MBS, kualitas (mutu) dan relevansi, keadilan, efektivitas, dan efisiensi serta akuntabilitas. Dari keempat aspek tersebut ialah Manajemen Berbasis Sekolah bertujuan mencapai mutu (quality) dan relevansi pendidikan yang setinggi-tingginya, dengan tolak ukur penilaian pada hasil (output dan outcome) bukan pada metodologi atau prosesnya. Mutu relevansi ada yang memandangnya sebagai satu kesatuan substansi, artinya hasil pendidikan yang bermutu sekaligus yang memisahkan keduanya maka mutu lebih merujuk pada dicapainya tujuan spesifik oleh siswa (kelulusan), seperti nilai ujian atau prestasi lainnya, sedangkan relevansi lebih merujuk pada manfaat apa yang diperoleh siswa melalui pendidikan dalam berbagai lingkup/tuntutan kehidupan (dampak), termasuk juga ranah pendidikan yang tidak diujikan.

Manajemen Berbasis Sekolah bertujuan menjamin keadilan bagi setiap anak untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu di sekolah yang bersangkutan. Dengan asumsi bahwa setiap anak berpotensi untuk belajar maka Manajemen Berbasis Sekolah memberi keleluasaan kepada setiap sekolah untuk menangani setiap anak dengan latar belakang sosial ekonomi dan psikologis yang beragam untuk memperoleh kesempatan dan layanan yang memungkinkan semua anak dan masing-masing anak berkembang secara optimal.

Antar sekolah harus saling memacu prestasi, tetapi setiap sekolah harus melayani setiap anak (bukan hanya yang pandai), dan secara keseluruhan sekolah harus mencapai standar kompetensi minimal bagi setiap anak yang diluluskan. Keadilan ini begitu penting sehingga par ahli sekolah efektif menyingkat tujuan sekolahnya hanya dengan mutu dan keadilan atau quality and equity.

Manajemen Berbasis Sekolah bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Efektivitas merupakan pengelolaan dan penggunaan semua input dalam bentuk non-uang (jumlah dan jenis buku, peralatan, pengorganisasian kelas, metodologi, strategi pembelajaran dll.) dihubungkan dengan hasil yang di capai (output-outcome). Efektivitas berhubungan dengan proses, prosedur, dan ketepatangunaan semua input yang di pakai dalam proses pendidikan sehingga menghasilkan hasil belajar siswa seperti yang di harapkan (sesuai tujuan). Efisiensi yang berhubungan dengan nilai uang yang dikeluarkan atau biaya (cost) untuk memenuhi semua input (proses dan semua input yang digunakan

dalam proses) dibandingkan atau dihubungkan dengan hasilnya (hasil belajar siswa).

Jadi, apabila yang dibahas dalam proses pendidikan untuk mencapai hasil (tujuan) bersifat non-uang maka pembahasan berhubungan dengan efektivitas sekolah, sebaliknya kalau yang dibahas dalam proses pendidikan di sekolah untuk mencapai hasil sesuai tujuan dihitung dalam bentuk uang (Rp) maka kita membahas efisiensi. Kedua proses dibandingkan hasilnya. MBS diharapkan dapat memenuhi efektivitas dan efisiensi sekolah karena perencanaan dibuat sesuai dengan kebutuhan sekolah, sedangkan pelaksanaannya juga diawasi oleh masyarakat.

Manajemen Berbasis Sekolah bertujuan meningkatkan akuntabilitas sekolah dan komitmen semua stake holders. Akuntabilitas adalah pertanggung jawaban atas semua yang dikerjakan sesuai wewenang dan tanggung jawab yang diperolehnya. Selama ini dipertanggungjawaban sekolah lebih pada masalah administratif-keuangan dan bersifat vertikal (keatas) sesuai jalur birokrasi. Pertanggung jawaban yang bersifat teknis edukatif terbatas pada pelaksanaan program sesuai petunjuk dan pedoman dari pusat (pusat dalam arti nasional maupun pusat-pusat birokrasi di bawahnya),tanpa pertanggung jawaban hasil pelaksanaan program.

Akuntabilitas pendidikan dan hasilnya (baik administratif-finansial maupun tingkat kualitas yang dicapai) diberikan bukan hanya kepada satu stakeholder (pusat/birokrasi), tetapi kepada berbagai pihak (stake holders), termasuk di dalamnya orang tua, komite sekolah (masyarakat), dan pengguna lulusan, disamping secara internal kepada guru-guru dan warga sekolah. Akuntabilitas kepada berbagai pihak ini pada gilirannya akan meningkatkan kepedulian yang kuat (komitmen) pihak-pihak terkait tersebut atas apa yang terjadi di sekolah, terutama dalam hal mutu, keadilan, efektivitas, efisiensi, transparansi, dan sebagainya yang merupakan unsur-unsur yang dituntut oleh konsep akuntabilitas pendidikan.

Kurikulum dan program pengajaran merupakan pijakan dalam proses pendidikan yang diselenggarakan pada sebuah lembaga pendidikan, perencanaan dan pembangunan kurikulum nasional telah dilakukan Departemen Pendidikan Nasional pada tingkat pusat. Akan tetapi sekolah juga bertugas dan berwenang mengembangkan kurikulum muatan lokal sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masyarakat setempat sosial dan budaya yang mendukung pembangunan lokal sehingga peserta didik tidak terlepas dari akar sosial budaya lingkungan (Mulyasa, 2002:40).

PERAN KEPALA SEKOLAH DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (MBS) DI SDN 1 BALEGONDO MAGETAN

Dalam Manajemen Berbasis Sekolah di Indonesia untuk muatan lokal mengharuskan setiap satuan pendidikan diharapkan dapat mengembangkan dan memunculkan keunggulan program pendidikan tertentu sesuai dengan latar belakang tuntutan lingkungan sosial masyarakat. Dengan otonomi sekolah dalam arti luas mempunyai fungsi untuk menghubungkan program-program sekolah dengan seluruh kehidupan peserta didik dan kebutuhan lingkungan sehingga setelah siswa menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan mereka siap pakai sesuai kebutuhan masyarakat.

Peningkatan produktifitas dan prestasi kerja dapat dilakukan dengan sumber daya manusia, Kepala sekolah, Guru dan Karyawan dengan cara mengikut sertakan pada kegiatan yang menunjang kinerja seluruh unsur sekolah. Manajemen tenaga kependidikan (guru dan personil) mencakup beberapa hal, yaitu : (1) perencanaan pegawai, (2) pengadaan pegawai, (3) pembinaan dan pengembangan pegawai, (4) promosi dan mutasi, (5) pemberhentian pegawai, (6) kompetensi, dan (7) penilaian pegawai (Mulyasa, 2002:42).

Hal ini menunjukkan, bahwa keberhasilan pengelolaan pendidikan pada sebuah sekolah apabila Kepala sekolah memiliki kemampuan untuk menciptakan kondisi yang melibatkan pada semua unsur pengelolaan sekolah

Salah satu tugas sekolah diawal tahun pelajaran baru adalah menata siswa. Manajemen kesiswaan adalah penataan dan pengaturan kegiatan berhubungan dengan peserta didik, awal pendaftaran sampai mereka lulus, tetapi bukan sekedar pencatatan data peserta didik, melainkan meliputi aspek lebih luas yang secara operasional dapat membantu upaya pertumbuhan murid melalui proses pendidikan di sekolah (Mulyasa, 2002:46). Meskipun pencatatan diperlukan untuk menunjang keberhasilan manajemen kemuridan, buku referensi murid, buku raport, daftar kenaikan kelas, buku mutasi murid dan sebagainya. Manajemen kesiswaan dimaksudkan bertujuan mengatur berbagai kegiatan pembelajaran sekolah berjalan dengan kondusif.

Kuangan merupakan sumber daya yang secara langsung dapat berpengaruh pada keefektifan dan efisiensi pengelolaan pendidikan yang diselenggarakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Manajerial kepala sekolah pada keuangan sangat dibutuhkan dalam penerapan Manajemen Berbasis Sekolah. Pelaksanaan Manajemen Berbasis sekolah (MBS) menuntut kemampuan sekolah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran, pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah (Mulyasa, 2002:47).

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) memberi kewenangan pada sekolah untuk menggali dan menggunakan sumber dana sesuai keperluan sekolah. Sumber dana dalam proses pendidikan dapat dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu: (1) pemerintah pusat atau pemerintah daerah, (2) orang tua/wali atau peserta didik, dan (3) masyarakat, baik mengikat maupun tidak mengikat. Berkaitan dengan penerimaan keuangan dari orang tua/wali murid dan masyarakat ditegaskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau UU No.2 tahun 1989 yaitu kemampuan pemerintah terbatas dalam pemenuhan kebutuhan dana pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua/wali murid.

Setiap satuan pendidikan tidak dapat melepaskan faktor sarana dan prasarana yang dapat dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, proses belajar mengajar. Manajemen sarana dan prasarana bertujuan dapat menciptakan kondisi yang menyenangkan, baik guru maupun murid untuk berada disekolah. Demikian pula tersedianya media pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan materi pelajaran sangat diperlukan manajemen pengelola pendidikan di satuan pendidikan (Nurkholis, 2006:32).

Hubungan antara sekolah dengan orang tua/wali murid serta masyarakat pada hakekatnya merupakan suatu sarana sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi murid di sekolah. Gaffar mengatakan bahwa hubungan sekolah dengan orang tua/wali murid bertujuan antara lain: (1) memajukan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan murid, (2) memperkokoh tujuan serta meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat, dan (3) menggairahkan masyarakat untuk menjalin hubungan

Melalui hubungan yang harmonis diharapkan tercapai tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat, yaitu proses pendidikan terlaksana secara produktif, efektif dan efisien sehingga menghasilkan lulusan yang produktif dan berkualitas. Lulusan yang berkualitas akan terlihat dari penguasaan/kompetensi murid tentang ilmu pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang dapat dijadikan bekal ketika terjun ditengah-tengah masyarakat.

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang berlangsung begitu cepat pada masa sekarang menyebabkan guru tidak bisa lagi melayani kebutuhan anak-anakan informasi, dan guru juga tidak bisa mengandalkan apa yang diperolehnya di bangku sekolah. Dalam manajemen pelayanan khusus meliputi didalamnya yaitu manajemen perpustakaan, kesehatan dan keamanan sekolah. Komponen-komponen tersebut merupakan bagian penting bagi MBS yang efektif dan efisien (Nurkholis, 2006:33).

MBS memiliki empat prinsip yaitu prinsip ekuifinalitas, prinsip desentralisasi, prinsip sistem pengelolaan mandiri, dan prinsip inisiatif sumber daya manusia. Prinsip ini berjalan dengan satu kesatuan, tidak bisa berjalan secara terpisah. Pertama, warga sekolah dalam kaitan pengelolaan dapat mengelola sekolah secara mandiri, yang dipimpin oleh kepala sekolah. Prinsip seperti ini dinamakan prinsip ekuifinalitas. Dalam pengelolaan tersebut, menyesuaikan latar belakang situasi dan kondisi sekolah. Seperti yang dijelaskan oleh Nurkolis (2003:52-53) bahwa “MBS menekankan fleksibilitas sehingga sekolah harus dikelola oleh warga sekolah menurut kondisi mereka masing-masing”. Di SDN 1 Balegondo, kepala sekolah beserta warganya membuat analisis kondisi sekolah dengan EDS. Berpedoman dari EDS itu, kepala sekolah akan mengetahui kelemahan dan kekuatan yang dimiliki sekolah. berdasarkan kelemahan itu, dicarikan alternatif pemecahan masalah dan solusi pemecahan masalah yang disepakati bersama.

Kedua, prinsip desentralisasi bertujuan untuk menemukan masalah sekaligus menentukan solusi permasalahan untuk proses pengajaran dan pembelajaran. Seperti yang dijelaskan oleh Nurkolis (2003:54) bahwa tujuan prinsip desentralisasi adalah “efisiensi dalam pemecahan masalah, bukan menghindari masalah. Oleh karena itu, MBS harus mampu menemukan masalah, memecahkannya tepat waktu dan memberi sumbangan yang lebih besar terhadap efektivitas aktivitas pengajaran dan pembelajaran”. Masalah yang terjadi di sekolah antara lain lemahnya penguasaan teknologi bagi guru dalam pembuatan media pembelajaran sehingga kepala sekolah memberikan pelatihan kepada guru, yaitu pelatihan IT seperti membuat power point sebagai media pembelajaran yang akan digunakan di dalam proses pembelajaran. Masalah lain, seperti rendahnya kedisiplinan anak dalam mengumpulkan tugas dan datang ke sekolah tepat waktu. Maka, kepala sekolah membuat program SPD untuk mengatasi hal tersebut.

Prinsip ketiga yaitu prinsip sistem pengelolaan mandiri, sehingga kemampuan manajerial kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah sangat penting sekali. Prinsip ini dijelaskan oleh Nurkolis (2003:54) bahwa “sekolah memiliki otonomi tertentu untuk mengembangkan tujuan pengajaran, strategi manajemen, distribusi sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, memecahkan masalah, dan mencapai tujuan berdasarkan kondisi mereka masing-masing”. Melalui SOP, seperti SOP sie kurikulum, SOP UKS, SOP Keuangan, SOP Profesi Siswa, SOP Sarpras, dan SOP sie Keamanan, SOP ini menjadi acuan para guru di dalam melaksanakan

sistem manajemen sekolah. Adanya SOP yang disusun dan diterapkan, maka pekerjaan kepala sekolah dalam hal pengelolaan sekolah akan lebih mudah, sehingga untuk mencapai tujuan sekolah sangat efektif dan efisiensi. Jika ada permasalahan dengan sistem SOP, maka kepala sekolah bersama tim guru selalu memperbaiki isinya.

Prinsip keempat adalah prinsip inisiatif manusia. Dengan mengenali potensi diri, potensi SDM yang dimiliki sekolah, maka kepala sekolah sebagai leader yang baik harus mampu mengelola dan memberdayakan potensi-potensi yang sekolah miliki. Seperti penjelasan Nurkolis (2003:55) tentang prinsip inisiatif manusia yaitu “prinsip ini mengakui bahwa manusia bukanlah sumber daya yang statis, melainkan dinamis. Oleh karena itu, potensi sumber daya manusia harus selalu digali, ditemukan, dan kemudian dikembangkan”. Potensi manajerial dari orangtua peserta didik, diberdayakan dalam melaksanakan kegiatan sekolah. Keterlibatan orangtua peserta didik, akan memudahkan kerja kepala sekolah dan guru. Hal ini sangat terbukti dari adanya kegiatan peringatan hari Ibu, seperti yang sudah dijelaskan pada fungsi MBS di atas. Segala sesuatu, baik materiil maupun non materiil berasal dari orangtua peserta didik secara sukarela. Kepala sekolah dan guru hanya sebagai tim evaluasi selama proses perencanaan hingga pelaksanaan proses kegiatan

Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah untuk SD dilakukan melalui Program Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (PPMBS). program MBS pada SD bersifat program rintisan dengan menekankan pada tiga tiga komponen, yaitu Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), Peran Serta Masyarakat (PSM), serta Pembelajaran Aktif Kreatif Menyenangkan. (PAKEM).Ketiganya untuk meningkatkan mutu pembelajaran.

Kepala sekolah adalah manajer pendidikan tingkat sekolah dan ujung tombak utama dalam mengelola pendidikan di sekolah. Kepala sekolah memegang peran poros yang paling penting untuk keberhasilan implementasi manajemen berbasis sekolah, dan oleh karena itu kepala sekolah harus mempunyai kemampuan manajerial yang professional dalam mengelola sekolahnya. Dalam Hadiyanto (2004), menurut Gaffar (2002) fungsi utama kepala sekolah dalam manajer pendidikan ditingkat sekolah adalah memahami konsep dan penerapan manajemen berbasis sekolah merupakan model manajemen yang sedang dikembangkan dalam era otonomi ditingkat persekolahan dan mencoba mengembangkan kemandirian semua unsur disekolah melalui pemberdayaan yang efisien dan efektif. Keberhasilan organisasi sekolah banyak ditentukan keberhasilan kepala sekolah dalam menjalankan peranan

PERAN KEPALA SEKOLAH DALAM MENGINPLEMENTASIKAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (MBS) DI SDN 1 BALEGONDO MAGETAN

dan tugasnya. Peranan adalah seperangkat sikap dan perilaku yang harus dilakukan sesuai dengan posisinya dalam organisasi. Peranan tidak hanya menunjukkan tugas dan hak, tapi juga mencerminkan tanggung jawab dan wewenang dalam organisasi.

Kepala sekolah sebagai pengelola satuan pendidikan (sekolah) bertanggung jawab terhadap efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan di sekolahnya, melalui peranan-peranan yang dimainkannya. Peranan yang dimainkan kepala sekolah sangatlah kompleks, di antaranya peran kepala sekolah sebagai pemimpin, administrator, manajer, supervisor dan penghubung masyarakat (Atmodiwirio, Soebagio, 1991:60). Menurut Mulyasa (2011:100-120) dalam bukunya yang berjudul *Menjadi Kepala Sekolah Profesional* menyatakan ada tujuh peran yaitu :Kegiatan belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan dan guru merupakan pelaksana dan pengembang utama kurikulum di sekolah. Kepala sekolah yang menunjukkan komitmen tinggi dan fokus terhadap pengembangan kurikulum dan kegiatan belajar mengajar di sekolahnya tentu saja akan sangat memperhatikan tingkat kompetensi yang dimiliki gurunya, sekaligus juga akan senantiasa berusaha memfasilitasi dan mendorong agar para guru dapat secara terus menerus meningkatkan kompetensinya, sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berjalan efektif dan efisien

Kepala sekolah sebagai Manajer. Dalam mengelola tenaga kependidikan, salah satu tugas yang harus dilakukan kepala sekolah adalah melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan pengembangan profesi para guru. Dalam hal ini, kepala sekolah seyogyanya dapat memfasilitasi dan memberikan kesempatan yang luas kepada para guru untuk dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan, baik yang dilaksanakan di sekolah, –seperti : MGMP/MGP tingkat sekolah, in house training, diskusi profesional dan sebagainya–, atau melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan di luar sekolah, seperti: kesempatan melanjutkan pendidikan atau mengikuti berbagai kegiatan pelatihan yang diselenggarakan pihak lain.

Dalam mengelola tenaga kependidikan, salah satu tugas yang harus dilakukan kepala sekolah adalah melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan pengembangan profesi para guru. Dalam hal ini, kepala sekolah seyogyanya dapat memfasilitasi dan memberikan kesempatan yang luas kepada para guru untuk dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan, baik yang dilaksanakan di sekolah, –seperti : MGMP/MGP tingkat sekolah, in house training, diskusi profesional dan sebagainya–, atau melalui kegiatan pendidikan dan

pelatihan di luar sekolah, seperti: kesempatan melanjutkan pendidikan atau mengikuti berbagai kegiatan pelatihan yang diselenggarakan pihak lain. .

Untuk mengetahui sejauh mana guru mampu melaksanakan pembelajaran, secara berkala kepala sekolah perlu melaksanakan kegiatan supervisi, yang dapat dilakukan melalui kegiatan kunjungan kelas untuk mengamati proses pembelajaran secara langsung, terutama dalam pemilihan dan penggunaan metode, media yang digunakan dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran (E. Mulyasa, 2004). Dari hasil supervisi ini, dapat diketahui kelemahan sekaligus keunggulan guru dalam melaksanakan pembelajaran, tingkat penguasaan kompetensi guru yang bersangkutan, selanjutnya diupayakan solusi, pembinaan dan tindak lanjut tertentu sehingga guru dapat memperbaiki kekurangan yang ada sekaligus mempertahankan keunggulannya dalam melaksanakan pembelajaran.

Untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan pekerjaannya dan dapat mendayagunakan seluruh potensi sumber daya yang ada di sekolah maka kepala sekolah harus memahami perannya. Tiga hal penting yang menjiwai supervisi pendidikan, yaitu: 1). Supervisi pendidikan adalah suatu perbuatan yang telah diprogramkan secara resmi oleh organisasi. Jadi bukan perbuatan yang dilakukan tanpa perencanaan terlebih dahulu, tetapi direncanakan secara matang sebelumnya.2).Supervisi pendidikan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh supervisor (kepala sekolah) dan secara langsung berpengaruh terhadap kemampuan profesional guru. 3). Supervisi pendidikan mempengaruhi kemampuan guruyang pada gilirannya meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didik, sehingga tujuan sekolah dapat tercapai secara optimal.

Untuk mengetahui sejauh mana guru mampu melaksanakan pembelajaran, secara berkala kepala sekolah perlu melaksanakan kegiatan supervisi, yang dapat dilakukan melalui kegiatan kunjungan kelas untuk mengamati proses pembelajaran secara langsung, terutama dalam pemilihan dan penggunaan metode, media yang digunakan dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran (E. Mulyasa, 2004). Dari hasil supervisi ini, dapat diketahui kelemahan sekaligus keunggulan guru dalam melaksanakan pembelajaran (tingkat penguasaan kompetensi guru yang bersangkutan),selanjutnya diupayakan solusi, pembinaan dan tindak lanjut tertentu sehingga guru dapat memperbaiki kekurangan yang ada sekaligus mempertahankan keunggulannya dalam melaksanakan pembelajaran. Jones dkk. sebagaimana disampaikan oleh Sudarwan Danim (2002) mengemukakan bahwa:

“menghadapi kurikulum yang berisi perubahan-perubahan yang cukup besar dalam tujuan, isi, metode

dan evaluasi pengajarannya, sudah sewajarnya kalau para guru mengharapkan saran dan bimbingan dari kepala sekolah mereka”.

Dari ungkapan ini, mengandung makna bahwa kepala sekolah harus betul-betul menguasai tentang kurikulum sekolah. Mustahil seorang kepala sekolah dapat memberikan saran dan bimbingan kepada guru, sementara dia sendiri tidak menguasainya dengan baik. Kepala sekolah mempunyai tugas sebagai supervisor. Kepala sekolah sebagai supervisor dimaksudkan untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap guru-guru dan personel lain untuk meningkatkan kinerja mereka. Kepala sekolah sebagai supervisor bertugas mengatur seluruh aspek kurikulum yang berlaku di sekolah agar dapat memberikan hasil yang sesuai dengan target yang telah ditentukan. Aspek-aspek kurikulum yang harus dikuasai oleh kepala sekolah sebagai supervisor adalah materi pelajaran, proses belajar mengajar, evaluasi kurikulum, pengelolaan kurikulum, dan pengembangan kurikulum.

Salah satu sumber daya manusia yang memiliki peran dominan dalam pengelolaan pendidikan di sekolah adalah pimpinan yang dikenal dengan sebutan kepala sekolah. Kepala sekolah memiliki tanggung jawab melakukan perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran. Keadaan tersebut dilandasi oleh anggapan bahwa tujuan utama penyeenggaraan pendidikan melalui sekolah adalah tercapainya lingkungan yang kondusif, sehingga proses belajar mengajar dapat tercapai secara efektif. Peran pokok pimpinan sekolah terletak pada kesanggupannya mempengaruhi lingkungan sekolah melalui penerapan proses kepemimpinan yang dinamis. Dengan demikian, maka kepala sekolah adalah seorang pemimpin pendidikan yang merencanakan, mengorganisasikan, mengkoordinasikan, mengawasi dan menyelesaikan seluruh kegiatan pendidikan di sekolah dalam pencapaian tujuan pendidikan. Tugas dan peranan kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan, belum sepenuhnya dapat dilaksanakan pimpinan. Inilah yang menyebabkan kepala sekolah terjebak dengan rutinitas pekerjaan dan belum mengupayakan peningkatan mutu sekolah yang diarahkan pada penciptaan sekolah sebagai tempat pembelajaran lebih baik. Oleh karena itu reposisi peranan kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan perlu ditinjau kembali, sehingga peranan kepala sekolah selaku pemimpin pendidikan dapat lebih berarti. Tugas dan tanggung jawab merupakan sesuatu hal yang harus dilaksanakan oleh seseorang dalam memangku suatu jabatan. Demikian pula dengan tugas dan tanggung jawab kepala sekolah. Kepala sekolah adalah pemimpin pendidikan yang memiliki peranan sangat besar dalam

mengembangkan mutu pendidikan di sekolah. Berkembangnya semangat kerja, kerjasama yang harmonis, minat terhadap perkembangan pendidikan, suasana kerja yang menyenangkan dan perkembangan mutu profesional di antara para guru, banyak ditentukan oleh kualitas kepemimpinan kepala sekolah. Dengan demikian kepala sekolah adalah salah satu kunci keberhasilan sekolah dalam mencapai tujuannya.

Peran kepala sekolah sebagai inovator juga berperan penting dalam mengadakan pembaharuan demi kemajuan sekolah yang ia pimpin. Mulyasa (2011:119) menjelaskan kepala sekolah sebagai inovatoryaitu “harus mampu mencari, menemukan, dan melaksanakan berbagai pembaharuan”. Dalam rangka mewujudkan peran dan fungsinya sebagaiinovator, kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan lingkungan, mencari gagasan baru, mengintegrasikan setiap kegiatan, memberikan teladan kepada seluruh tenaga kependidikan di sekolah, dan mengembangkan model-model pembelajaran (Mulyasa, 2011:118). Beberapa kegiatan yang dilakukan kepala sekolah sebagai inovator adalah dengan ide dan gagasan kreatifnya dalam membuat program kerja unggulan sekolah. Program unggulan sekolah yaitu adanya program SPD yang telah berjalan selama dua tahun dan adanya program Nomor Absen Ramah Lingkungan. Program kerja ini bertujuan untuk meningkatkan pola hidup sehat dan rasa kasih sayang kepada lingkungan sekolah, serta kasih sayang antara kakak tingkat dan adik tingkat.

peran kepala sekolah sebagai motivator bahwa kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk memberikan motivasi kepada para tenaga kependidikan dalam melakukan berbagai tugas dan fungsinya. Cara yang dapat dilakukan oleh kepala sekolah dalam mewujudkan peran dan fungsinya sebagai motivator adalah “melalui pengaturan lingkungan fisik, pengaturan suasana kerja, disiplin, dorongan, penghargaan secara efektif, dan penyediaan berbagai sumber belajar melalui pengembangan Pusat Sumber Belajar (PSB). Demikian pula yang dilakukan oleh kepala memberikan dorongan atau motivasi kepada tenaga kependidikan dan komponen SDM sekolah yang ada. Beliau memberikan motivasi kepada orangtua setiap saat rapat untuk menghimbau kepada orangtua agar bersama dengan kepala sekolah dan guru untuk memajukan kualitas sekolah, sehingga orangtua peserta didik merasa termotivasi. Hal ini dapat meningkatkan motivasi kepada orangtua untuk mendorong anak didiknya agar tidak berhenti dalam belajar mencari ilmu pengetahuan. Selain kepada orangtua dan peserta didik, juga dorongan motivasi

PERAN KEPALA SEKOLAH DALAM MENGINPLEMENTASIKAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (MBS) DI SDN 1 BALEGONDO MAGETAN

diberikan kepada guru seperti dibebaskan untuk belajar kemanapun mereka inginkan

Teori peran adalah perspektif dalam sosiologi dan psikologi sosial yang menganggap sebagian besar kegiatan sehari-hari menjadi pemeran dalam kategori sosial (misalnya ibu, manajer, guru). Setiap peran sosial adalah seperangkat hak, kewajiban, harapan, norma dan perilaku seseorang untuk menghadapi dan memenuhi. Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang berperilaku dengan cara yang dapat diprediksi, dan bahwa perilaku individu adalah konteks tertentu, berdasarkan posisi sosial dan faktor lainnya. Teater adalah metafora sering digunakan untuk menggambarkan teori peran.

Rober Linton (1936) telah mengembangkan teori peran. Teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa yang diterapkan pada budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita berperilaku dalam kehidupan sehari-hari

Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan seseorang dalam status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut. Perilaku peran mungkin berbeda dari perilaku yang diharapkan karena beberapa alasan. Teori peran memberikan dua harapan pertama, harapan-harapan dari masyarakat dari pemegang peran terhadap orang lain yang mempunyai relasi dengannya dalam menjalankan perannya. Teori peran memberikan dua harapan dan saling berhubungan untuk mendapatkan reward atau imbalan. Dalam hal ini kepala sekolah merupakan seseorang yang dapat diharapkan oleh stakeholder untuk mengembangkan mutu pendidikan dan mengimplementasikan Manajemen berbasis sekolah sesuai harapan sekolah agar terlaksana dengan baik

METODE

Materi pokok bagian ini adalah: (1) rancangan penelitian; Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan metode Deskriptif. Menurut Sugiyono (2015:15), Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Sejalan dengan hal tersebut Moelong (2014:6) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata – kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dalam menggambarkan kondisi objek penelitian, menurut

Moelong (2014:11) metode deskriptif merupakan metode yang memungkinkan peneliti mendapatkan data yang berupa kata – kata, gambar dan bukan angka angka. Sehingga laporan penelitian akan berisi kutipan - kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Data dapat berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, dan dokumen resmi lainnya.

Penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas serta mendeskripsikan tentang pandangan peran kepala sekolah dalam implemmentasi Manajemen Berbasis Sekolah. Pendekatan deskriptif kualitatif juga memungkinkan dalam melakukan kegiatan pengamatan secara langsung dan mendengarkan secara seksama setiap penuturan informan yang berkaitan dengan peran guru dalam implementasi MB

Secara Konseptual, hubungan antar variabel – variabel tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

“Penelitian ini bertempat di SDN 1 Balegondo Magetan alasan dari pemilihan SDN 1 Balegondo sebagai lokasi penelitian ini adalah karena Pemilihan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan praktis yaitu (1) Keterjangkauan dan kemudahan akses pelaksanaan penelitian; (2) Respon positif guru terhadap pelaksanaan implementasi MBS di sekolah tersebut.”

“Waktu penelitian adalah lamanya waktu yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan penelitian, mulai dari persiapan, konsultasi judul, penyusunan proposal, pengurusan laporan penelitian, observasi pendahuluan yang dilakukan semenjak Agustus – Desember 2016 pengajuan judul dan disetujui untuk dibuat penelitian.”

“Seperti yang dikemukakan oleh Lofland dalam Moelong (2014:157) bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata kata dan tindakan. Selebihnya data yang digunakan yaitu data tambahan berupa dokumen dan lain nya berkaitan dengan hal itu jenis data berupa kata kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik. Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapatkan oleh peneliti melalui kegiatan observasi dan wawancara, sedangkan data sekundernya berupa foto foto dan rekaman suara (dokumentasi).

Informan pada penelitian ini ditentukan dengan menggunakan purposive sampling (sampel bertujuan) yakni teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2014:54). Dalam penelitian ini menggunakan informan yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti. Informan merupakan orang yang dianggap mengetahui, memahami masalah yang dijadikan penelitian oleh peneliti. Berdasarkan pertimbangan, berikut uraian

informan dalam penelitian : 1). Bpk Drs. Subiyanto, MPd selaku Kepala Sekolah 2). Bpk Wahyono, S.Pd selaku Wali kelas 3). Bpk Agus Sarwono, S.Pd selaku Guru Agama “

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang digunakan penelitian dalam memperoleh data dan bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian. Wawancara menurut Sugiyono (2015:317) adalah komunikasi dua orang untuk bertukar informasi serta ide melalui proses tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna suatu topik tertentu. Adapun kegiatan wawancara saat penelitian ini ditujukan kepada kepala sekolah dan guru dengan tujuan untuk menggali informasi yang lengkap dan akurat tentang peran guru dalam implementasi Manajemen Berbasis Sekolah. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur terbuka, yaitu pewawancara menetapkan sendiri pertanyaannya dan memberikan pertanyaan yang bersifat spontan jika informasi yang didapat tidak bisa menjawab rumusan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepala sekolah merupakan pengelola lembaga pendidikan. kepala sekolah berfungsi sebagai pemimpin pendidikan berarti peningkatan mutu akan berjalan dengan baik apabila guru bersifat terbuka, kreatif dan memiliki semangat kerja yang tinggi. Suasana yang demikian ditentukan oleh bentuk dan sifat kepemimpinan yang dilakukan kepala sekolah. Pola kepemimpinannya akan sangat berpengaruh bahkan sangat menentukan kemajuan sekolah. Oleh karena itu dalam pendidikan modern kepemimpinan kepala sekolah merupakan jabatan strategis dalam mencapai tujuan pendidikan.

Kegiatan belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan dan guru merupakan pelaksana dan pengembang utama kurikulum di sekolah. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bp.Subiyanto selaku Kepala sekolah SDN 1 Balegondo, yaitu :

“ kepala sekolah sebagai educator ini mbak lebih menekankan pada peningkatan kurikulum, di sekolah ini saya sering melakukan pelatihan IT kepada semua guru agar tidak gaptek dan tidak ada kendala ketika menyusun RPP lo mbak kan kadang guru ada yang tidak begitu menguasai Microsoft excel maupun word , memberikan evaluasi belajar setiap semesternya dan pembelajaran dalam bentuk nilai sisipan dan *raport*”(wawancara dilakukan pada 1 Juni 2017 09:30 WIB di SDN 1 Balegondo)”.

Dapat disimpulkan bahwa bapak subiyanto selaku kepala sekolah SDN 1 Balegondo tanggap

terhadap peran sebagai educator dengan memberikan pengembangan kurikulum serta pembelajaran melalui IT serta seringnya mengadakan evaluasi sehingga perkembangan belajar siswa dapat terkontrol dengan baik.

Peran kepala sekolah sebagai manajer terlihat dari kemampuan atau potensi kepala sekolah dalam mengendalikan atau memberdayakan potensi SDM yang dimiliki sekolah. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bp.Subiyanto selaku Kepala sekolah SDN 1 Balegondo, yaitu

“biasanya di setiap kota diadakan *workshop* mbak untuk semua guru, nanti dari SD 1 Balegondo ini saya menugaskan beberapa guru untuk mengikuti *workshop* tersebut agar nanti informasinya bisa disampaikan ke teman guru yang lain, adanya pembelajaran untuk meningkatkan guru dalam hal membuat media pembelajaran. Menjalinkan komunikasi dengan komite dan orang tua murid dan keterbukaan mengenai dana sekolah, itu disampaikan setiap pengambilan *rapot* mbak. Jadi sistemnya disini transparan” (wawancara dilakukan pada 1 Juni 2017 09:30 WIB di SDN 1 Balegondo).

Peran yang dilakukan kepala sekolah dalam hal manager dapat dilihat dengan dorongan dan tugas yang diberikan kepala sekolah kepada guru untuk mengikuti *workshop* yang diadakan dari setiap kecamatan guna mengembangkan potensi guru agar dapat diterapkan kepada siswa dengan tujuan mengembangkan prestasi siswa dan memberikan pengetahuan baru.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bp.Subiyanto selaku Kepala sekolah SDN 1 Balegondo, yaitu :

“peran kepala sekolah sebagai administrator itu berkaitan dengan Dana pendidikan mbak, setiap pengeluaran dan pemasukan tercatat tidak hanya dalam bentuk *papper* tetapi ada juga di *softfile*. Dan berkaitan dengan anggaran belanja ini saya tidak memutuskan sendiri mbak, jadi kami mengadakan rapat adanya masukan dan usulan dari guru maupun orangtua siswa nanti dibicarakan bersama dengan komite juga” (wawancara dilakukan pada 1 Juni 2017 09:30 WIB di SDN 1 Balegondo).

Peran kepala sekolah dalam hal administrator bekejasama dengan komite memberikan gambaran jelas tentang pengeluaran dan pemasukan dana kepada guru dan orang tua siswa agar tidak adanya kesalahpahaman dalam hal mengelola dana pendidikan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bp.Subiyanto selaku Kepala sekolah SDN 1 Balegondo, yaitu :

“bentuk pengawasan yang saya sering lakukan ketika waktu senggang yakni observasi kelas pada

PERAN KEPALA SEKOLAH DALAM MENGINPLEMENTASIKAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (MBS) DI SDN 1 BALEGONDO MAGETAN

saat jam pembelajaran untuk melihat kemampuan guru dalam mengajar, melakukan pendekatan kepada guru secara individual dan kelompok guru. Kemudian memberi pengarahan kepada mbak, biasanya ada rapat setiap bulannya untuk mengontrol perkembangan prestasi siswa, kendala orangtua pada saat orangtua memiliki masalah dengan prestasi belajar anak” (wawancara dilakukan pada 1 Juni 2017 09:30 WIB di SDN 1 Balegondo).

Dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah tetap mengadakan observasi serta pendekatan khusus kepada guru guna mengontrol dan mengetahui kendala yang dihadapi serta melihat perkembangan prestasi siswa dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.

Berdasarkan wawancara dengan Bp.Subiyanto selaku kepala sekolah SD 1 Balegondo, Adapun kepala sekolah sebagai pemimpin mempunyai tugas yaitu :

“diadakannya rapat rutin setiap tahun ajaran baru mbak, yang membahas mengenai visi, misi dan tujuan sekolah yang melibatkan guru, komite sama orang tua siswa. Jadi diadakan musyawarah, ini bertujuan agar komunikasi warga sekolah dengan orang tua siswa dapat berjalan dengan baik mbak, sedikit menghindari banyaknya protes gitu. Penyusunan program kerja jangka panjang maupun jangka pendek yang dikelola dengan tim kesiswaan maupun tim kurikulum ” (wawancara dilakukan pada 1 Juni 2017 09:30 WIB di SDN 1 Balegondo).

Dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah dalam membuat dan memberikan keputusan tidak dilakukan sendiri, tetapi dengan melibatkan semua pihak seperti guru, komite, orang tua siswa dan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk membangun hubungan kepala sekolah dengan semua pihak guna mendapatkan citra baik serta dukungan dari masyarakat untuk memajukan sekolah.

Berdasarkan wawancara dengan Bp.Subiyanto selaku kepala sekolah SD 1 Balegondo, Adapun kepala sekolah sebagai pemimpin mempunyai tugas yaitu :

“ yaa hanya memberikan ide-ide kreatif tentang media pembelajaran, pengelolaan bidang akademik maupun non akademik untuk memajukan SDN 1 Balegondo gitu aja mbak” (wawancara dilakukan pada 1 Juni 2017 09:30 WIB di SDN 1 Balegondo).

Dalam hal peran sebagai innovator kepala sekolah diharuskan mempunyai ide yang kreatif dalam membantu guru mengembangkan pembelajaran dalam bidang akademik maupun nonakademik. Berdasarkan wawancara dengan Bp.Subiyanto selaku kepala sekolah SD 1 Balegondo, Adapun kepala sekolah sebagai pemimpin mempunyai tugas yaitu :

“ saya memberikan motivasi kepada orangtua setiap saat rapat untuk menghimbau kepada orangtua mbak, agar bersama dengan kepala sekolah dan guru untuk memajukan kualitas

sekolah”(wawancara dilakukan pada 1 Juni 2017 09:30 WIB di SDN 1 Balegondo).

Kepala sekolah beserta guru menghimbau kepada masyarakat agar bersama-sama memajukan kualitas sekolah demi tercapainya mutu pendidikan yang berkualitas.

Berdasarkan Wawancara yang dilakukan dengan kepala sekolah, bahwa Sekolah Dasar tidak memiliki wakil kepala sekolah di bagian kurikulum, bagian kesiswaan dan bagian hubungan masyarakat. Sehingga semua tugas tersebut dilakukan dan disusun oleh kepala sekolah dibantu dewan guru serta staf karyawan dan mendapatkan pertimbangan dari semua pihak sekolah termasuk orangtua siswa. Berikut hasil wawancara dengan bapak subiyanto selaku kepala sekolah di SDN 1 Balegondo, yaitu :

”Sekolah dasar itu mbak tidak ada yang namanya waka kurikulum, waka keasiswaan gitu. Jadi yaa semuanya yang mengerjakan saya sendiri dengan pertimbangan dari banyak pihak. Kalau di SMP dan SMA kan lengkap. Jadi dalam pengelolaan kegiatan akademik dan non akademik, penyusunan kalender akademik, trus pembuatan tata tertib, larangan dan hukuman gitu itu kepala sekolah yang membuatnya”

Sehingga dari penuturan kepala sekolah tersebut adapun peran lain yang dilakukan kepala sekolah di SDN 1 Balegondo, yaitu: Pengelolaan kegiatan akademik yang dilakukan oleh guru yakni yang berkaitan dengan cara mengelola kegiatan belajar mengajar didalam kelas sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Feby selaku guru kelas 1 sebagai berikut :

“ mengelola kelas itu mbak tidak semudah apa yang kita bayangkan, apalagi ini berkaitan dengan anak-anak yang duduk di sekolah dasar. Tentunya lebih sulit mengkondisikan kelas daripada mengelola kelas yang duduk dibangku sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah keatas. Tapi ya gitu mba, kita sebagai guru harus pintar mengkondisikan mood nya anak-anak biar semangat dalam belajar-mengajar. Di sekolah kami diwajibkan untuk melakukan salam dan berdoa sebelum masuk kelas, hal ini diperuntukan supaya anak berperilaku sopan dan mengawali kegiatan apaun dengan berdoa. Di Tahun ajaran baru ini mba, dari dinas pendidikan dari seluruh jenjang pendidikan harus menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum memulai proses KBM agar anak terbiasa dan diajarkan sikap patriotism dan “nasionalisme sejak dini. Setelah itu mbak, selama KBM berlangsung tidak lurus-lurus aja mbak. Ada saja kendala, misalnya ada anak yang menangis karena mengalami kesulitan dalam belajar, menangis karena kehilangan alat tulis dan lain-lain. Jadi kita sebagai guru SD

harus pintar ngemong mbak, istilahnya seperti itu.. (wawancara dilakukan pada 1 Juni 2017 10:00 di SDN 1 Balegondo).

Adapun perbedaan dari cara pengelolaan yang dilakukan ibu Feby dengan pengelolaan yang dilakukan dengan ibu wiwik selaku guru kelas 5, sebagai berikut :

“kalau saya mbak, kegiatan akademik yang saya lakukan tentunya bersalaman dan berdoa ketika masuk kelas, menyanyikan lagu Indonesia raya kemudian dilanjutkan kegiatan belajar mengajar seperti biasa Cuma bedanya saya kan megang kelas 5 jadi siswanya sedikit lebih mengerti dan paham. Kondisi kelasnya juga dapat di handle, mungkin hanya ada teguran sedikit bagi anak yang bandel”(wawancara dilakukan pada 1 Juni 2017 10:00 di SDN 1 Balegondo).

Sehingga pengelolaan akademik yang dilakukan kepala sekolah dibantu oleh guru dalam penerapannya di pembelajaran terhadap siswa. Karena gurulah yang terjun langsung dengan siswa, guru yang menjadi pendidik. Secara umum tata tertib sekolah dapat diartikan sebagai ikatan atau aturan yang harus dipatuhi setiap warga sekolah tempat berlangsungnya proses belajar mengajar. Pelaksanaan tata tertib sekolah akan dapat berjalan dengan baik jika guru, aparat sekolah dan siswa telah saling mendukung terhadap tata tertib sekolah itu sendiri, kurangnya dukungan dari siswa akan mengakibatkan kurang berartinya tata tertib sekolah yang diterapkan di sekolah. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Subiyanto selaku kepala sekolah dalam wawancara sebagai berikut : Beberapa syarat membuat peraturan sekolah yang bisa dijalankan dengan efektif

Membuat peraturan sekolah haruslah menggunakan kata kata yang lugas dan tidak bersayap, agar bisa dimengerti. Dengan mudahnya aturan dipahami siswa, bukan saja siswa akan mudah menjalankan aturan tersebut, tapi juga siswa tidak akan mampu membantah kalau mereka melanggar peraturan tersebut, karena semuanya sudah jelas. Dan artinya gurupun akan dengan mudah menunjukkan kesalahan yang dilakukan siswa.

Syarat kedua peraturan adalah bahwa peraturan itu haruslah mudah dilaksanakan. Peraturan juga tidak boleh melanggar kehormatan pribadi seseorang atau golongan. Sehingga peraturan akan lebih gampang dibuat. Sekarang siswa siswi kita lebih beragam baik asal usul, kebudayaan, agama, kebiasaan, kelas sosialnya juga berlainan, oleh karena itu buatlah peraturan yang tidak menyinggung salah satu dari mereka.

“Kalau saya katakan bikin peraturan jangan memakai kata “jangan” ataupun “tidak”, biasanya para guru selalu merespon dengan kalimat ‘iya, betul karena kita harus selalu berfikir positif, positive thinking”. Dan biasanya saya merespon balik dengan tersenyum sambil berkata, “benar sekali, kita harus selalu berfikir positif, berfikir positif akan membuat semangat kita tak pernah padam, tidak ada kata ‘putus asa”. Namun sebetulnya latar belakang dari peraturan yang tidak memakai kata “jangan” ataupun “tidak”, bukanlah masalah positive thinking. Karena kedua hal itu berbeda dan tidak berada di kapal yang sama

Peraturan yang tegas adalah peraturan yang dilakukan secara efektif, artinya siapa yang melanggar akan mendapat konsekwensi dari pelanggaran yang dilakukan. Oleh karena itu peraturan yang diberlakukan harus disertai konsekwensinya.

Peraturan akan terasa adil kalau dilakukan tanpa pandang bulu, siapapun, kapanpun dimanapun peraturan dilakukan maka konsekwensi itu harus dijalankan. Padang bulu juga berarti bulunya pak guru dan bu guru, artinya pelanggaran itu diketahui guru yang mana saja maka konsekwensi itu akan tetap berlaku. Sebab kalau hanya satu dua guru saja yang menjalankan peraturan dengan benar maka siswa akan membuat penilaian tersendiri pada masing masing guru. Dan ini akan tidak bagus bagi pengembangan disiplin, watak, dan tabiat siswa. Selain peraturan harus dipatuhi oleh siswa seluruh komponen sekolah juga harus seia sekata menegaka aturan tersebut.

Konsisten itu bermakna konstan, tetap atau sama. Peraturan yang diberlakukan di sekolah haruslah selalu konsisten, semua orang diperlakukan sama. Dengan melibatkan siswa dalam membuat aturan kita telah mengajarkan rasa tanggungjawab, kepercayaan pada diri sendiri, dan sekaligus mereka merasa dipentingkan. Begitu peraturan dan konsekwensinya jadi, siswa akan lebih merasa wajib patuh karena peraturan itu mereka yang membuat sendiri.

“Untuk konsekwensinya guru harus hati hati dalam mengarahkan siswa saat membuatnya. Jangan sampai konsekwensi berubah jadi hukuman yang merendahkan derajat siswanya. (wawancara dilakukan 1 Juni 2017 09.00 WIB di SDN 1 Balegondo Magetan)”

Sehingga pembuatan peraturan harus dijadikan pertimbangan dengan berbagai pihak agar nantinya tidak ada perdebatan serta protes yang adalah jadwal penyelenggaraan kegiatan akademik selama jangka waktu setahun. Satu tahun akademik dibagi menjadi di semester, yakni semester gasal, semester genap.

PERAN KEPALA SEKOLAH DALAM MENGINPLEMENTASIKAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (MBS) DI SDN 1 BALEGONDO MAGETAN

Setiap satuan pendidikan perlu memperhatikan komponen-komponen Manajemen Sekolah. Dalam penerapan Manajemen Berbasis Sekolah beberapa komponen sekolah yang perlu dikelola yaitu kurikulum dan program pengajaran, tenaga kependidikan, kemuridan, sarana dan prasarana pendidikan, dan pengelolaan hubungan sekolah dan orang tua/wali murid (Mulyasa, 2002: 40).

Kurikulum dan program pengajaran merupakan pijakan dalam proses pendidikan yang diselenggarakan pada sebuah lembaga pendidikan, Perencanaan dan pengembangan kurikulum nasional telah dilakukan Departemen Pendidikan Nasional pada tingkat pusat. Akan tetapi sekolah juga bertugas dan berwenang mengembangkan kurikulum muatan lokal sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masyarakat setempat.

Dalam manajemen kurikulum dan pengajaran, kesepakatan kepala sekolah dengan guru menentukan muatan lokal yang diberikan kepada siswa dengan penuh pertimbangan. Karena pemilihan muatan lokal "Anyaman bamboo" dan Informatika ini akan berguna bagi siswa untuk bekal setelah lulus maupun dapat dimanfaatkan dalam bidang lain. Peningkatan produktifitas dan prestasi kerja dapat dilakukan dengan sumber daya manusia, Kepala sekolah, Guru dan Karyawan dengan cara mengikut sertakan pada kegiatan yang menunjang kinerja seluruh unsur sekolah. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak subiyanto selaku kepala sekolah SDN 1 Balegondo, yaitu :

"keberhasilan mengelola pendidikan apabila kepala sekolah mampu menciptakan kondisi yang melibatkan semua unsure sekolah, jadi mbak setiap adanya pelatihan pengembangan pegawai saya sebagai kepala sekolah menghimbau kepada guru agar dapat mengikuti setiap adanya pelatihan agar mampu mengikuti setiap perkembangan yang terjadi di dunia pendidikan mbak"(wawancara dilakukan pada 2 Juni 2017 02:00 di SDN 1 Balegondo)

Adanya pelatihan guru dapat sangat membantu mengembangkan prestasi serta kinerja guru sebagai tenaga pendidik.meningkatkan kualitas sekolah dalam mutu pendidikan dan memberikan pengaruh besar terhadap prestasi siswa. Salah satu tugas sekolah diawal tahun pelajaran baru adalah menata siswa. Manajemen kesiswaan adalah penataan dan pengaturan kegiatan berhubungan dengan peserta didik, awal pendaftaran sampai mereka lulus, tetapi bukan sekedar pencatatan data peserta didik, melainkan meliputi aspek lebih luas yang secara operasional dapat membantu upaya pertumbuhan murid melalui proses pendidikan di sekolah.

Kepala sekolah harus berperan aktif dalam pencapai prestasi siswa, bukan hanya guru saja. Kepala sekolah juga melakukan evaluasi dan terjun langsung dengan siswa dalam hal memberikan motivasi belajar sehingga kepala sekolah mempunyai hubungan yang baik dengan siswanya.

Manajerial kepala sekolah pada keuangan sangat dibutuhkan dalam penerapan Manajemen Berbasis Sekolah. Pelaksanaan Manajemen Berbasis sekolah (MBS) menuntut kemampuan sekolah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran, pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak subiyanto selaku kepala sekolah SDN 1 Balegondo, yaitu :

"sumber dana di SD 1 Balegondo ini hanya ada dari pemerintah saja mbak, dan terkait dana BOS nantinya selalu ada rapat setiap semester ketika pengambilan rapot itu diadakan musyarah juga dengan wali murid. Disini g ada mbak kayak uang 'sogokan' gitu. Cari siswa aja susah sekarang, kan kalah sama sekolah di kota" (wawancara dilakukan pada 2 Juni 2017 02:00 di SDN 1 Balegondo).

Kepala sekolah secara transparan membuat anggaran belanja, pengeluaran dan pemasukan dana sehingga *stakeholder* dapat mengetahui dana secara langsung akan digunakan dan didapatkan.

Setiap satuan pendidikan tidak dapat melepaskan faktor sarana dan prasarana yang dapat dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, proses belajar mengajar. Manajemen sarana dan prasarana bertujuan dapat menciptakan kondisi yang menyenangkan, baik guru maupun murid untuk berada disekolah. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak subiyanto selaku kepala sekolah SDN 1 Balegondo, yaitu :

"pengadaan sarana dan prasaran disini mbak, dirasa kurang cukup karena mungkin minimnya dana yang dikelola sehingga untuk menyediakan sarana dan prasarana yang cukup bagus masih perlu pertimbangan. Seperti halnya perpustakaan yang kurang besar dan buku yang masih dikatakan lumayan sedikit, kemudian peralatan UKS dan mushola yang masih ala kadarnya. Tapi Alhamdulillah masih bisa dikatakan layak semua mbak" (wawancara dilakukan pada 2 Juni 2017 02:00 di SDN 1 Balegondo).

Rencana kepala sekolah di SDN 1 Balegondo Sarana dan prasarana yang ada dapat diadakannya sumbangan dana dan sumbangan buku untuk memperbaiki semua fasilitas yang ada di sekolah.

Pada konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), manajemen hubungan sekolah dengan orang tua/wali murid diharapkan berjalan dengan baik. Hubungan yang harmonis membuat masyarakat memiliki tanggungjawab untuk memajukan sekolah.

Penciptaan hubungan dan kerja sama yang harmonis, apabila masyarakat mengetahui dan memiliki gambaran yang jelas tentang sekolah. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Subiyanto selaku kepala sekolah SDN 1 Balegondo, yaitu :

“kepala sekolah wajib menciptakan hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar dan orang tua siswa mbak, hal ini bertujuan agar proses pendidikan terlaksana secara produktif, efektif dan efisien sehingga dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas. Nah maksud dari lulusan berkualitas itu mbak sikap dan ketrampilan yang dapat dijadikan bekal ketika suatu saat nanti siswa akan terjun ke lapangan. Sehingga mentalnya berani tidak minder menghadapi orang dan mempunyai pengalaman”(wawancara dilakukan pada 2 Juni 2017 02:00 di SDN 1 Balegondo).

Membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat, dan orang tua siswa yang telah dilakukan kepala sekolah SD 1 Balegondo mampu menjadikan SD sebagai salah satu sekolah favorit bukan hanya di desa Balegondo saja bahkan di kecamatan Ngariboyo. Dalam manajemen pelayanan khusus meliputi didalamnya yaitu manajemen perpustakaan, kesehatan dan keamanan sekolah. Komponen-komponen tersebut merupakan bagian penting bagi MBS yang efektif dan efisien.

“pengadaan sarana dan prasarana disini mbak, dirasa kurang cukup karena mungkin minimnya dana yang dikelola sehingga untuk menyediakan sarana dan prasarana yang cukup bagus masih perlu pertimbangan. Seperti halnya perpustakaan yang kurang besar dan buku yang masih dikatakan lumayan sedikit, kemudian peralatan UKS dan mushola yang masih ala kadarnya. Tapi Alhamdulillah masih bisa dikatakan layak semua mbak” (wawancara dilakukan pada 2 Juni 2017 02:00 di SDN 1 Balegondo)

Pembahasan

Peran kepala sekolah dalam implementasi Manajemen Berbasis Sekolah yakni meliputi peran sebagai educator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator dan motivator. Bapak Subiyanto selaku kepala sekolah di SDN 1 Balegondo sudah melaksanakan peran tersebut demi tercapainya implementasi Manajemen Berbasis Sekolah yang diharapkan.

MBS memiliki empat prinsip yaitu prinsip ekuifinalitas, prinsip desentralisasi, prinsip sistem pengelolaan mandiri, dan prinsip inisiatif sumber daya manusia. Prinsip ini berjalan dengan satu kesatuan, tidak bisa berjalan secara terpisah. Pertama, warga sekolah dalam kaitan pengelolaan dapat mengelola sekolah secara mandiri, yang dipimpin oleh kepala sekolah. Prinsip seperti ini dinamakan prinsip

ekuifinalitas. Dalam pengelolaan tersebut, menyesuaikan latar belakang situasi dan kondisi sekolah. Di SDN 1 Balegondo, kepala sekolah beserta warganya mengadakan rapat pada awal semester atau ketika pengambilan rapot siswa, sehingga segala hal yang menjadi rencana untuk kemajuan SDN 1 Balegondo akan disepakati dan disetujui semua pihak sekolah beserta orang tua wali.

Kedua, prinsip desentralisasi bertujuan untuk menemukan masalah sekaligus menentukan solusi permasalahan untuk proses pengajaran dan pembelajaran. Disinilah peran kepala sekolah sebagai educator dapat di implementasikan sesuai dengan prinsip desentralisasi ini. Masalah yang terjadi di SDN 1 Balegondo antara lain lemahnya penguasaan teknologi bagi guru dalam pembuatan media pembelajaran sehingga kepala sekolah memberikan pelatihan kepada guru, yaitu pelatihan IT seperti membuat power point sebagai media pembelajaran yang akan digunakan di dalam proses pembelajaran. Dalam beberapa waktu, kepala sekolah menyarankan kepada semua guru untuk mengikuti pelatihan atau workshop yang diadakan di kecamatan setiap bulannya. Hal ini bertujuan agar guru mampu mengikuti perkembangan dan peningkatan mutu pendidikan.

Prinsip ketiga yaitu prinsip sistem pengelolaan mandiri, sehingga kemampuan manajerial kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah sangat penting sekali. Prinsip keempat adalah prinsip inisiatif manusia. Dengan mengenali potensi diri, potensi SDM yang dimiliki sekolah, maka kepala sekolah sebagai leader yang baik harus mampu mengelola dan memberdayakan potensi-potensi yang sekolah miliki. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peran kepala sekolah berkaitan erat dengan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah yang mana prinsip tersebut mencakup semua peran kepala sekolah dalam mengimplementasikan MBS sesuai standart pendidikan dan tujuan di setiap sekolah.

Dengan adanya tujuh pilar Manajemen Berbasis Sekolah dapat menjadi acuan kepala sekolah dalam penerapan MBS. Sesuai dengan hasil penelitian yaitu kepala sekolah sudah menerapkan 7 komponen Manajemen Berbasis Sekolah tersebut dengan melibatkan guru, staf dan karyawan sekolah, masyarakat serta orang tua siswa untuk terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan yang dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan sekolah.

Rober Linton (1936) telah mengembangkan teori peran. Teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa yang diterapkan pada budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan seseorang dalam status tertentu, maka perilaku peran

PERAN KEPALA SEKOLAH DALAM MENGINPLEMENTASIKAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (MBS) DI SDN 1 BALEGONDO MAGETAN

adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut. Sehingga peran kepala sekolah disini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang membawa perubahan mutu pendidikan yang lebih maju.

Dalam pandangan masyarakat, kepala sekolah adalah sebagai pemimpin yang menjadi panutan atau teladan serta contoh (reference) bukan hanya bagi warga sekolah namun juga bagi masyarakat sekitar. Kepala sekolah dan guru adalah pemegang norma dan nilai-nilai yang harus dijaga dan dilaksanakan. Ini dapat kita lihat bahwa betapa ucapan guru dalam masyarakat sangat berpengaruh terhadap orang lain. Ki Hajar Dewantoro menggambarkan peran guru sebagai stakeholder atau tokoh panutan dengan ungkapan-ungkapan *Ing Ngarso Sung Tulodho, Ing Madya Mangun Karso, Tut Wuri Handayani*.

Teori peran memberikan dua harapan pertama, harapan-harapan dari masyarakat dari pemegang peran terhadap orang lain yang mempunyai relasi dengannya dalam menjalankan perannya. Masyarakat mauapun warga sekolah menaruh harapan besar atas kemajuan Manajemen berbasis sekolah di SDN 1 Balegondo agar lebih mengembangkan prestasi dalam bidang akademik maupun non akademik.. kepala sekolah seharusnya menunjukkan kelakuan yang layak sesuai dengan jabatan yang ia miliki sebagai seorang pemimpin sekolah yang mana akan membawa pengaruh yang sangat besar bagi sekolah, guru serta anak didik, dan masyarakat. Kepala sekolah tidak hanya memiliki satu peran saja, ia bisa berperan sebagai pemimpin dan sebagai seorang pengajar. Peran peran kepala sekolah sebagai pemimpin merupakan kunci keberhasilan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah, karena kepala sekolah yang langsung berhubungan dengan kemajuan Manajemen Berbasis Sekolah. Bagaimanapun bagusnyamanajemen suatu sekolah , sarana dan prasarana yang lengkap tanpa didukung kepala sekolah yang profesional akan menjadi sia-sia dan jauh dari tujuan pendidikan itu sendiri.

PENUTUP

Simpulan

Dapat disimpulkan bahwa implementasi MBS yang dilaksanakan di SDN 1 Balegondo sudah berjalan dengan baik dan berdasarkan pada prinsip MBS. Pilar MBS menjadi patokan kepala sekolah dalam mengelola dan menerapkan manajemen sekolah, sehingga adanya otonomi dalam pengelolaan merupakan potensi bagi sekolah untuk meningkatkan kinerja dan partisipasi langsung dengan masyarakat.”

Disamping itu dalam implementasi MBS di SDN 1 Balegondo sudah dapat dilihat adanya kemandirian sekolah di segala bidang kepemimpinan yang kuat sehingga mampu mengkoordinasi dan menyerasikan sumber daya yang tersedia”. “Adanya komunikasi yang efektif dan partisipasi yang tinggi serta pengembangan

tenaga pendidik, diimbangi pula dengan transparansi dalam bidang keuangan.”

Saran

Manajemen berbasis sekolah di SDN 1 Balegondo cukup terimplementasi dengan baik sesuai yang diharapkan pihak sekolah. Peran kepala sekolah harus memiliki strategi tepat untuk semua potensi melalui kerja sama atau kooperatif, memberikan kesempatan kepada semua guru meningkatkan profesinya dan mendorong keterlibatan seluruh komponen demi terimplementasinya MBS dengan baik. Menjalin kerja sama hubungan y harmonis dengan orang tua siswa dan masyarakat demi tercapainya tujuan sekolah. Meningkatkan peran serta masyarakat mendukung kinerja sekolah, program sekolah disusun dan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan proses belajar-mengajar bukan kepentingan administrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu N.Andini. 2007. Isu Isu Pendidikan. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Indonesia.
- “Arif Rohman & Teguh Wiyono. 2010. Education Policy In Decentration Era. Yogyakarta: Pusaka Belajar.
- Hadiyanto. “2004. Paradigma Baru Pendidikan Nasional”. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hasbullah. 2006. Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Moleong , Lexi J . 2002 .Metode Penelitian Kualitatif. Bandung. Remaja Rosdakarya
- Mulyasa, E. 2002. Manajemen Berbasis Sekolah. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- _____. 2004. Menjadi Kepala Sekolah Profesional- Dalam konteks menyukseskan MBS dan KBK. Cetakan keempat. Bandung : PT.RRemaja Rosda Karya
- Nuridin, Muhammad. 2010. Kiat Menjadi Guru Profesional. Yogyakarta : AR Ru Media
- Prabangkit, Didik. 2002. Meningkatkan Mutu Sekolah Dasar Melalui Manajemen Berbasis Sekolah (school Based Management). Fasilitator Edisi 3. Jakarta: Direktorat Pendidikan TK dan SD.
- Sagala. 2004. Manajemen Berbasis Sekolah dan Masyarakat Strategi Memenangkan Persaingan Mutu. Jakarta : Nimas Multima
- Sardiman, A.M. 2004. Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada

Sugiyono. 2010. Memahami Penelitian Kualitatif.

Bandung : Alfabeta

Usman, M.U. 1995. Menjadi Guru Profesional. Bandung

: PT.Remaja Rosdakarya